



**SALINAN**

**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

**dan**

**BUPATI SIGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.232.011.851.554 berkurang sejumlah Rp. 102.360.897.942,00 sehingga menjadi Rp. 1.129.650.953.612,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan			
1) Semula	Rp	1.232.011.851.554,00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(102.360.897.942,00)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.129.650.953.612,00	
b. Belanja			
1) Semula	Rp	1.817.700.181.554,00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(88.313.036.172,37)</u>	
Jumlah Daerah setelah perubahan	Rp	1.729.387.145.381,63	
Defisit	Rp	(599.736.191.769,63)	
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	586.488.330.000,00	
b) Bertambah	Rp	<u>14.247.861.769,63</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	600.736.191.769,63	
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	800.000.000,00	
b) Bertambah	Rp	<u>200.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp		N I H I L

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
1)	Semula	Rp	52.923.944.059,00
2)	Bertambah	Rp	560.776.244,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	53.484.720.303,00
b.	Dana Perimbangan		
1)	Semula	Rp	957.071.883.000,00
2)	(Berkurang)	Rp	(130.562.232.429,00)
	Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp	826.509.650.571,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1)	Semula	Rp	222.016.024.495,00
2)	Bertambah	Rp	27.640.558.243,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	249.656.582.738,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah		
1)	Semula	Rp	10.590.356.658,00
2)	Bertambah	Rp	11.302.000.000,00
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	711.643.342,00
b..	Retribusi Daerah		
1)	Semula	Rp	2.769.110.000,00
2)	(Berkurang)	Rp	(783.938.000,00)
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	1.985.172.000,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1)	Semula	Rp	800.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	N I H I L
	Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	800.000.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1)	Semula	Rp	38.764.477.401,00
2)	Bertambah	Rp	633.070.902,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	39.397.548.303,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Dana Bagi Hasil		
1)	Semula	Rp	17.004.516.000,00
2)	Bertambah	Rp	13.407.228.571,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	30.411.744.571,00

b.	Dana Alokasi Umum		
1)	Semula	Rp	656.997.426.000,00
2)	(Berkurang)	Rp	<u>(67.245.311.000,00)</u>
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp	589.752.115.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
1)	Semula	Rp	283.069.941.000,00
2)	(Berkurang)	Rp	<u>(76.724.150.000,00)</u>
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	206.345.791.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
1)	Semula	Rp	27.988.910.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>21.717.990.000,00</u>
	Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp	49.706.900.000,00
b.	Dana Darurat		
1)	Semula	Rp	N I H I L
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>N I H I L</u>
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp	N I H I L
c.	Dana Bagi Hasil Pajak		
1)	Semula	Rp	22.857.419.495,00
2)	Bertambah	Rp	<u>4.405.836.243,00</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp	27.263.255.738,00
d.	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus		
1)	Semula	Rp	171.169.695.000,00
2)	(Berkurang)	Rp	<u>(1.581.308.000,00)</u>
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah perubahan	Rp	169.588.387.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya		
1)	Semula	Rp	N I H I L
2)	Bertambah	Rp	<u>3.098.040.000,00</u>
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	3.098.040.000,00
f.	Pendapatan Lainnya		
1)	Semula	Rp	N I H I L
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>N I H I L</u>
	Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan	Rp	N I H I L

### Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung		
1)	Semula	Rp	1.292.881.114.916,86
2)	(Berkurang)	Rp	<u>(22.868.344.663,33)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp	1.270.012.770.253,53

b..	Belanja Langsung		
	1) Semula	Rp	524.819.066.637,14
	2) (Berkurang)	Rp	(65.444.691.509,04)
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp	459.374.375.128,10
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp	470.474.618.251,06
	2) (Berkurang)	Rp	(28.140.098.054,13)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	442.334.520.196,93
b.	Belanja Bunga		
	1) Semula	Rp	NIHIL
	2) Bertambah/Berkurang	Rp	NIHIL
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp	NIHIL
c.	Belanja Subsidi		
	1) Semula	Rp	NIHIL
	2) Bertambah/Berkurang	Rp	NIHIL
	Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp	NIHIL
d.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp	53.522.500.000,00
	2) (Berkurang)	Rp	(416.300.000,00)
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	53.106.200.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp	548.610.765.000,00
	2) Bertambah	Rp	833.500.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	549.444.265.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil		
	1) Semula	Rp	1.335.946.665,80
	2) (Berkurang)	Rp	(7.229.465,80)
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	1.328.717.200,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1) Semula	Rp	217.137.285.000,00
	2) (Berkurang)	Rp	(7.288.217.143,40)
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	209.849.067.856,60
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp	1.800.000.000,00
	2) Bertambah	Rp	12.150.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan	Rp	13.950.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp	42.619.171.300,00
	2) Bertambah	Rp	4.361.616.020,00
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	46.980.787.320,00

b.	Belanja Barang dan Jasa		
1)	Semula	Rp	247.122.269.253,02
2)	Bertambah	Rp	<u>6.685.803.548,67</u>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	253.808.072.801,69
c.	Belanja Modal		
1)	Semula	Rp	235.077.626.084,12
2)	(Berkurang)	Rp	<u>(76.492.111.077,71)</u>
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	158.585.515.006,41

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- |    |                      |     |                    |
|----|----------------------|-----|--------------------|
| a. | penerimaan sejumlah  | Rp  | 600.736.191.769,63 |
| b. | pengeluaran sejumlah | Rp. | 1.000.000.000,00   |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |    |  |     |       |
|----|--|-----|-------|
| a. | SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah                 | Rp. | NIHIL |
| b. | pencairan dana cadangan sejumlah                         | Rp. | NIHIL |
| c. | hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | NIHIL |
| d. | penerimaan pinjaman daerah sejumlah                      | Rp. | NIHIL |
| e. | penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah           | Rp. | NIHIL |
| f. | penerimaan piutang daerah sejumlah                       | Rp. | NIHIL |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |    |   |     |                  |
|----|---|-----|------------------|
| a. | pembentukan dana cadangan sejumlah                      | Rp. | NIHIL            |
| b. | penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| c. | pembayaran pokok utang sejumlah                         | Rp. | NIHIL            |
| d. | pemberian pinjaman daerah sejumlah                      | Rp. | NIHIL            |

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |    |              |   |   |
|----|--------------|---|---|
| a. | Lampiran I   | : | Ringkasan Perubahan APBD;   |
| b. | Lampiran II  | : | Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;   |
| c. | Lampiran III | : | Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;   |
| d. | Lampiran IV  | : | Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;   |
| e. | Lampiran V   | : | Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
| f. | Lampiran VI  | : | Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;   |

- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

**Pasal 6**

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagai landasan operasional Pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 24 September 2020

**BUPATI SIGI,**

ttd

**MOHAMAD IRWAN**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 24 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,**


ttd

**MUH. BASIR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 41/04/2020**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

  
**RUSDIN, SH**  
Pembina  
NIP. 19721205 200212 1 007